

POLUSI DIGITAL KRISIS EPISTEMIK DAN TATA KELOLA KEBENARAN DALAM PERADABAN DIGITAL

¹ M. Yoserizal Saragih, ² Depi Lisnawati

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
(email: ¹ yoserizal@uinsu.ac.id, ² depilisnawati1@gmail.com)

Abstrak

Polusi digital yang didefinisikan sebagai pencemaran sistematis lingkungan informasi melalui disinformasi algoritmik dan rekayasa ketidakpastian epistemic merupakan tantangan krusial peradaban abad ke-21. Artikel ini mengusulkan *Truth Governance Framework* (TGF) sebagai solusi integratif yang menggabungkan kesiapan sipil, komunikasi jurnalistik profetik, dan agensi epistemic generasi baru. Berbeda dengan pendekatan moderasi konten yang bersifat reaktif, artikel ini berargumen bahwa polusi digital adalah patologi struktural kapitalisme digital yang memerlukan tata kelola epistemic yang komprehensif. Mengintegrasikan perspektif Global Selatan dan jurnalisme profetik dari M. Yoserizal Saragih, studi ini mengajukan tiga proposisi orisinal: (1) polusi digital sebagai krisis ontologis, (2) komunikasi trans-nubuwwah sebagai model epistemic jurnalisme, dan (3) TGF sebagai arsitektur kebijakan global. Artikel ini diposisikan sebagai kontribusi dari wacana Global Selatan mengenai tata kelola epistemic dan sebagai teks dasar bagi bidang studi peradaban digital yang sedang berkembang.

Kata kunci: Polusi digital, tata kelola epistemic, komunikasi trans-nubuwwah, jurnalisme profetik, disinformasi

Abstract

Digital pollution, defined as the systematic contamination of the information environment through algorithmic disinformation and the engineering of epistemic uncertainty, is a critical challenge facing 21st-century civilization. This article proposes the Truth Governance Framework (TGF) as an integrative solution that combines civic readiness, prophetic journalism, and the epistemic agency of the new generation. Unlike reactive content moderation approaches, this article argues that digital pollution is a structural pathology of digital capitalism that requires comprehensive epistemic governance. Integrating the Global South perspective and prophetic journalism from M. Yoserizal Saragih, this study puts forward three original propositions: (1) digital pollution as an ontological crisis, (2) trans-nubuwwah communication as an epistemic model of journalism, and (3) TGF as a global policy architecture. This article is positioned as a contribution to the Global South discourse on epistemic governance and as a foundational text for the emerging field of digital civilization studies.

Keywords: *Digital pollution, epistemic governance, trans-nubuwwah communication, prophetic journalism, disinformation*

Introduction

Perkembangan pesat jaringan digital telah melahirkan sebuah paradoks yang berada di jantung peradaban abad ke-21 kelimpahan informasi yang belum pernah terjadi sebelumnya tidak menghasilkan peningkatan yang sepadan dalam pengetahuan kolektif, kompetensi demokratis, atau kebijaksanaan kewarganegaraan. Artikel ini menyebut fenomena yang mendasari hal tersebut sebagai polusi digital degradasi sistematis lingkungan informasi publik melalui sirkulasi massal konten yang palsu, menyesatkan, dimanipulasi, atau merusak epistemik pada skala platform.

Berbeda dengan misinformasi era analog yang dibatasi oleh batasan fisik distribusi cetak dan siaran, polusi digital diperkuat secara algoritmik, didorong secara struktural oleh ekonomi perhatian, dan mampu menyebar ke seluruh permukaan ruang publik global dalam hitungan jam. Jangkauan, kecepatan, dan karakter sistemiknya membuatnya secara kualitatif berbeda dari bentuk-bentuk kontaminasi epistemik sebelumnya. Pada dimensi terdalamnya, ini adalah krisis ontologis: bukan sekadar pertanyaan tentang klaim spesifik mana yang benar, melainkan keruntuhan kondisi sosial dan kelembagaan yang memungkinkan pencarian kebenaran itu sendiri dalam skala kolektif (Baudrillard, 1994).

Perbedaan antara polusi digital dan kategori yang lebih sempit seperti misinformasi dan disinformasi bersifat penting secara analitis dan signifikan secara praktis. Misinformasi mengacu pada konten yang salah atau tidak akurat yang dibagikan tanpa niat menipu hasil dari kesalahan, kesalahpahaman, atau bias kognitif (Wardle & Derakhshan, 2017). Disinformasi mengacu pada konten palsu yang sengaja diproduksi dan disebarkan untuk mencapai tujuan politik, komersial, atau ideologis tertentu. Polusi digital, sebagaimana diteorikan dalam artikel ini, merupakan kondisi struktural yang lebih luas di mana kedua fenomena tersebut bersama dengan pembingkaiannya hiperpartisan, konten pseudosaintifik, narasi konspirasi, dan konstruksi realitas yang terdistorsi secara algoritmik menjenuhkan wacana publik hingga landasan epistemik bersama yang dibutuhkan oleh deliberasi demokratis menjadi tidak tersedia secara struktural.

Konsep pasca-kebenaran (*post-truth*) menggambarkan kondisi sosio-epistemik di mana daya tarik emosional dan narasi identitas kelompok memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap opini publik daripada bukti empiris yang dapat diverifikasi (McIntyre, 2018. Lewandowsky, Ecker, & Cook, 2017). Kapitalisme digital model ekonomi dominan di era informasi yang ditandai dengan ekstraksi nilai dari data dan perhatian manusia sebagai komoditas utama menciptakan insentif struktural yang mendorong penyebaran konten yang merugikan secara epistemologis. Dinamika filter bubble dan echo chamber semakin memperparah fragmentasi ruang publik, sehingga dialog lintas perspektif yang menjadi fondasi legitimasi demokrasi mengalami erosi sistemik (Pariser, 2011 Sunstein, 2017).

Meskipun literatur mengenai misinformasi dan kapitalisme pengawasan telah berkembang pesat, sebagian besar solusi yang ditawarkan saat ini masih terjebak pada pendekatan teknokratis seperti moderasi konten reaktif atau cek fakta parsial. Terdapat celah penelitian (gap) yang signifikan dalam merumuskan kerangka tata kelola yang mampu menyentuh akar patologi structural khususnya yang mengintegrasikan kearifan epistemik dari perspektif Global Selatan dengan realitas algoritma global. Hingga saat ini, belum ada model yang secara komprehensif menghubungkan kesiapan warga negara dengan etika komunikasi profetik sebagai pilar pertahanan epistemik. Oleh karena itu, masalah utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah: bagaimana merancang sebuah arsitektur tata kelola informasi yang tidak hanya menangani konten, tetapi juga memperbaiki ekosistem pencarian kebenaran yang telah runtuh?

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini mengusulkan kerangka tata kelola kebenaran (*Truth Governance Framework/TGF*) sebagai arsitektur konseptual untuk merespons polusi digital secara sistemik. Tujuan artikel ini adalah mengembangkan argumentasi bahwa polusi digital bukan sekadar kegagalan teknis atau deviasi perilaku individual, melainkan patologi struktural peradaban digital yang menuntut tata kelola epistemik terintegrasi. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan studi peradaban digital dan tata kelola epistemik dalam konteks Global Selatan maupun diskursus global.

Literature Review

1. Krisis Epistemik dan Era *Post-Truth*

Transformasi ruang publik digital telah memunculkan kondisi yang sering disebut sebagai post-truth, yakni situasi ketika fakta objektif kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik dibandingkan emosi dan keyakinan personal (McIntyre, 2018, Lewandowsky et al., 2017). Dalam kondisi ini, kebenaran tidak lagi diposisikan sebagai hasil verifikasi rasional, melainkan sebagai produk afiliasi identitas dan resonansi emosional.

Secara epistemologis, situasi ini dapat dipahami sebagai krisis terhadap fondasi rasionalitas modern yang selama ini dibangun atas prinsip falsifikasi (Popper, 1959) dan paradigma ilmiah (Kuhn, 1962). Kritik (Feyerabend, 1975) terhadap metodologi tunggal dalam ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa struktur produksi pengetahuan selalu dipengaruhi oleh konteks kekuasaan dan ideologi. Perspektif ini sejalan dengan analisis (Foucault, 1980) mengenai relasi kuasa-pengetahuan (*power/knowledge*) yang menegaskan bahwa produksi kebenaran tidak pernah sepenuhnya netral.

(Habermas, 1989) dalam teori transformasi ruang publik menekankan pentingnya

rasionalitas komunikatif sebagai fondasi demokrasi. Namun, dalam era digital, ruang publik mengalami fragmentasi struktural sehingga konsensus rasional semakin sulit dicapai. Yang membedakan kondisi post-truth dari episode propaganda sejarah sebelumnya adalah keterikatan strukturalnya dalam arsitektur sistem platform digital, platform yang dioptimalkan secara algoritmik untuk keterlibatan tidak hanya secara pasif menampung konten yang menyesatkan, tetapi secara aktif memberi penghargaan terhadapnya (WHO, 2020).

2. Misinformasi, Disinformasi, dan Information Disorder

Perbedaan konseptual antara misinformasi dan disinformasi telah dijelaskan secara sistematis oleh (Wardle dan Derakhshan, 2017). Misinformasi adalah informasi salah tanpa niat jahat, sedangkan disinformasi merupakan informasi palsu yang disebarluaskan secara sengaja untuk tujuan tertentu. (Bradshaw dan Howard, 2019) menunjukkan bahwa manipulasi media sosial telah terorganisasi secara global, melibatkan aktor politik dan institusional.

Penelitian (Pennycook, Cannon, dan Rand, 2018) menunjukkan bahwa paparan berulang terhadap berita palsu meningkatkan persepsi akurasi fenomena yang disebut *illusory truth effect* memperlihatkan bagaimana bias kognitif bekerja dalam ekosistem digital. (Kahneman, 2011) menjelaskan fenomena ini melalui teori *thinking fast and slow*, di mana sistem berpikir cepat (*intuitif*) lebih dominan dalam konsumsi informasi digital dibandingkan refleksi analitis. (WHO, 2020) memperkenalkan istilah *infodemic* untuk menggambarkan ledakan informasi yang memperumit respons terhadap krisis global, menegaskan bahwa polusi digital berdampak langsung terhadap kesehatan publik dan stabilitas sosial.

Namun, artikel ini berargumen bahwa polusi digital melampaui kerangka *information disorder* merupakan distorsi sistemik terhadap arsitektur epistemik itu sendiri cara kebenaran diproduksi, diverifikasi, dan disebarluaskan dalam masyarakat digital. Ruang publik digital telah menjadi lingkungan di mana misinformasi dan disinformasi saling berinteraksi dan memperkuat satu sama lain dalam siklus degradasi epistemik yang sangat sulit untuk dihentikan begitu terbentuk.

3. Algoritma, Filter Bubble, dan Fragmentasi Demokrasi

(Pariser, 2011) memperkenalkan konsep filter bubble untuk menjelaskan bagaimana personalisasi algoritmik membatasi paparan terhadap perspektif berbeda. (Sunstein, 2017) menambahkan bahwa demokrasi digital yang terfragmentasi berpotensi menciptakan polarisasi ekstrem dan melemahkan deliberasi publik. (Gillespie, 2014) menegaskan bahwa algoritma bukan sekadar instrumen teknis, melainkan aktor normatif yang membentuk struktur visibilitas dan prioritas informasi mediator epistemik yang menentukan apa yang dianggap relevan, kredibel, dan layak viral.

(Zuboff, 2019) melalui konsep *surveillance capitalism* menjelaskan bahwa ekonomi digital berbasis ekstraksi data dan perhatian menciptakan insentif struktural untuk memaksimalkan keterlibatan (*engagement*), bahkan jika harus mengorbankan kualitas epistemik informasi. Polusi digital adalah konsekuensi logis dari struktur ekonomi platform, bukan sekadar kegagalan etika individu. Ketika warga negara tidak dapat melakukan musyawarah melintasi perbedaan karena lingkungan informasi mereka telah direayasa untuk hanya menjumpai konten yang mengonfirmasi keyakinan yang sudah ada, dialog demokratis sejati mengalami penghancuran sistematis.

4. Simulasi, Realitas, dan Ontologi Digital

(Baudrillard, 1994) melalui konsep *simulacra and simulation* menjelaskan bagaimana realitas dalam masyarakat kontemporer digantikan oleh *representasi hiper-realitas*. Dalam konteks digital, batas antara fakta dan fabrikasi menjadi semakin kabur. Polusi digital, dalam perspektif ini, merupakan manifestasi *hiper-realitas* yang terlepas dari referensi empiris, memperkuat argumen bahwa krisis yang terjadi bukan hanya epistemik, tetapi ontologis. Keruntuhan kondisi yang memungkinkan klaim kebenaran diverifikasi secara kolektif.

Dimensi ontologis dari polusi digital dampaknya tidak hanya terhadap apa yang diyakini orang, tetapi terhadap struktur realitas sosial bersama itu sendiri merupakan aspek yang paling signifikan secara filosofis. Ketika realitas informasional yang dialami melalui media sosial menyimpang secara sistematis dari keadaan dunia yang dapat diverifikasi secara empiris, hasilnya adalah fragmentasi ontologis: runtuhnya dunia faktual bersama yang merupakan prasyarat untuk komunikasi yang bermakna dan tindakan kolektif yang terkoordinasi.

5. Kontribusi Global Selatan dan Jurnalistik Profetik

Dalam konteks Global Selatan, (Saragih, 2018) mengidentifikasi karakteristik jurnalistik Islam berbasis Al-Qur'an yang menekankan prinsip *siddiq*, amanah, *tabligh*, dan *fathanah* sebagai fondasi etika komunikasi yang relevan dalam menghadapi degradasi epistemik era digital. (Saragih dan Harahap, 2020) menyoroti tantangan media cetak di era digital, mendokumentasikan bagaimana tekanan ekonomi struktural kapitalisme digital migrasi pendapatan iklan, tekanan produksi konten *clickbait*, percepatan siklus publikasi secara sistematis mengikis kondisi kelembagaan bagi jurnalisme yang ketat dan berbasis bukti.

(Saragih, 2025a) mengembangkan paradigma jurnalistik ekoteologi Islam Nusantara yang mengintegrasikan tauhid, kurikulum cinta, dan etika Pancasila sebagai fondasi epistemik alternatif. Konsep jurnalistik profetik (Saragih, 2025b) menawarkan integrasi nilai akhlak

nubuwwah dengan teknologi AI dan etika penyiaran modern. Dalam karya Jurnalistik Islam (Saragih, 2025c), ditegaskan bahwa praktik tabayun verifikasi komprehensif sebelum penyebaran informasi merupakan mekanisme normatif yang dapat diterapkan secara langsung untuk mengatasi polusi digital.

Prinsip jurnalisme Islam tabayun, dalam analisis Saragih, menetapkan standar jurnalistik yang ketat secara epistemologis yang mendahului sekaligus melampaui protokol pengecekan fakta kontemporer. Jurnalisme yang berlandaskan tabayun tidak sekadar kompeten secara profesional; ia memiliki keutamaan epistemologis yang tidak dapat ditangkap oleh akurasi teknis semata. Dengan demikian, Kerangka Tata Kelola Kebenaran (TGF) yang diajukan dalam artikel ini merupakan sintesis antara teori demokrasi, epistemologi modern, kritik kapitalisme digital, serta etika jurnalistik profetik sebagai kontribusi Global Selatan.

Meskipun literatur yang dipaparkan di atas telah memberikan fondasi yang kuat mengenai mekanisme teknis dan dampak sosiologis dari polusi digital, terdapat keterbatasan dalam cara studi terdahulu menawarkan solusi. Sebagian besar studi Barat cenderung berfokus pada perbaikan teknis (*algorithmic fixes*) atau regulasi hukum terhadap platform (Zuboff, 2019; Gillespie, 2014). Di sisi lain, kajian etika komunikasi sering kali berhenti pada level normatif individu tanpa menghubungkannya dengan tata kelola sistemik.

Posisi penelitian ini berada pada titik temu antara kritik makro terhadap kapitalisme digital dan rekonstruksi mikro berbasis nilai-nilai profetik. Kebaruan (*novelty*) artikel ini terletak pada penggabungan dimensi ontologis Baudrillard dengan metodologi *tabayun* dan etika nubuwah yang dikembangkan oleh Saragih. Jika penelitian sebelumnya melihat disinformasi sebagai "gangguan informasi" (*information disorder*), penelitian ini memosisikannya sebagai "patologi peradaban".

Kontribusi orisinal yang ditawarkan adalah *Truth Governance Framework (TGF)*. TGF melampaui konsep literasi media konvensional dengan memperkenalkan "Komunikasi Trans Nubuwwah" sebagai arsitektur epistemik baru. Dengan mengintegrasikan nilai *Siddiq*, *Amanah*, *Tabligh*, dan *Fathanah* ke dalam tata kelola ruang publik digital, artikel ini mengisi celah (gap) dalam literatur tata kelola global yang selama ini kurang mengakomodasi perspektif epistemik dari Global Selatan sebagai solusi praktis-sistemik terhadap krisis kebenaran global.

Methods

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena artikel berfokus pada pengembangan kerangka konseptual mengenai polusi digital sebagai krisis epistemik dalam peradaban digital

global, bukan pada pengujian hipotesis empiris melalui survei atau eksperimen. Metode kepustakaan dipandang tepat untuk tugas sintesis teoritis yang mengintegrasikan berbagai aliran wacana akademik lintas disiplin.

Data penelitian bersumber dari literatur ilmiah nasional dan internasional yang relevan dengan tema *post-truth*, misinformasi dan disinformasi, algoritma media sosial, kapitalisme digital, demokrasi deliberatif, serta jurnalistik Islam dan komunikasi profetik. Penelitian ini juga merujuk pada laporan institusional yang membahas fenomena disinformasi global dan infodemi.

Proses pemilihan sumber dilakukan secara sistematis dengan menetapkan kriteria inklusi yang ketat, yakni mengutamakan artikel jurnal terindeks internasional (Scopus/Sinta 1 dan 2), buku referensi yang diterbitkan oleh penerbit akademik terkemuka, dan laporan lembaga internasional yang kredibel (seperti WHO atau UNESCO). Pencarian literatur dilakukan melalui basis data akademik menggunakan kata kunci spesifik: "*digital pollution*", "*epistemic crisis*", "*prophetic journalism*", dan "*truth governance*". Sumber-sumber yang dipilih adalah literatur yang diterbitkan dalam rentang waktu yang relevan dengan perkembangan kapitalisme digital terkini untuk memastikan aktualitas data.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui tiga tahapan sistematis yang diadaptasi dari metode analisis isi dan sintesis konseptual.

1. Identifikasi dan Kategorisasi. Tahap awal melibatkan pemindaian mendalam (*deep scanning*) untuk mengidentifikasi konsep-konsep utama yang berkaitan dengan polusi digital dan krisis epistemik. Pada tahap ini, dilakukan ekstraksi proposisi teoritis dari setiap literatur yang relevan.
2. Komparasi dan Kritik Internal. Tahap kedua adalah membandingkan berbagai perspektif teoritis yang menjelaskan fenomena *post-truth* dan fragmentasi ruang publik digital. Analisis difokuskan pada mencari titik temu (*convergence*) dan perbedaan (*divergence*) antara teori Barat (seperti kapitalisme pengawasan) dengan perspektif Global Selatan (jurnalisme profetik).
3. Sintesis Teoretis dan Konstruksi Model. Tahap terakhir adalah mengintegrasikan temuan konseptual tersebut ke dalam satu kerangka analitis yang utuh. Melalui proses inferensi logis dan abstraksi teoritis, penelitian ini merumuskan Kerangka Tata Kelola Kebenaran (TGF) yang mencakup Kompetensi Epistemik Kewarganegaraan (CEC), Integritas Epistemik Institusional (IEI), dan Arsitektur Epistemik Platform (PEA) sebagai tiga domain yang saling berkaitan dalam sebuah ekosistem tata kelola informasi yang tangguh.

Results and Discussion

1. Polusi Digital sebagai Krisis Epistemik dan Ontologis

Hasil analisis menunjukkan bahwa polusi digital merupakan fenomena yang bersifat sistemik dan tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan misinformasi atau disinformasi semata. Secara epistemik, terjadi pelemahan mekanisme verifikasi dan rasionalitas publik, di mana opini lebih banyak dibentuk oleh emosi dan afiliasi identitas dibandingkan bukti empiris. Secara ontologis, terjadi pergeseran fundamental dalam cara realitas diproduksi dan direpresentasikan di ruang digital, sehingga batas antara fakta dan simulasi menjadi semakin kabur (Baudrillard, 1994).

Ilustrasi kasus Fenomena *Deepfake* dalam kontestasi politik global menunjukkan bagaimana batas ontologis ini runtuh. Ketika video kecerdasan buatan dapat memanipulasi wajah dan suara tokoh publik dengan tingkat presisi tinggi, masyarakat tidak lagi hanya berdebat tentang interpretasi fakta, tetapi tentang keberadaan fakta itu sendiri. Ini menciptakan skeptisisme permanen di mana kebenaran dianggap sebagai pilihan selera, bukan realitas objektif.

Kondisi ini diperparah oleh apa yang disebut sebagai krisis kepercayaan epistemik, di mana institusi tradisional kehilangan otoritasnya dalam mendefinisikan kebenaran di hadapan narasi alternatif yang terfragmentasi (Hameleers, 2023). Polusi digital bukan sekadar sirkulasi klaim palsu individual, melainkan penghancuran sistematis atas realitas bersama yang dibutuhkan oleh dialog demokratis sejati. Prasyarat epistemik demokrasi yang diidentifikasi (Dahl, 1989) pemahaman yang tercerahkan sebagai kemampuan warga negara membentuk preferensi berdasarkan informasi akurat secara langsung dan terukur dirusak oleh polusi digital, yang menyuntikkan racun epistemik ke dalam sistem sirkulasi wacana demokrasi.

Era *post-truth* mempercepat disintegrasi ini melalui mekanisme yang sama kuatnya secara politik sekaligus merusak secara epistemologis: delegitimasi otoritas epistemologis kelembagaan sebagai bentuk kekuasaan, sehingga membuat skeptisisme terhadap bukti dan keahlian menjadi penanda identitas politik yang otentik, bukan kegagalan penalaran. Toksisitas informasi efek kumulatif dari paparan berkelanjutan terhadap lingkungan informasi yang tercemar secara aktif dan terukur merusak kemampuan masyarakat untuk berpikir kolektif secara rasional, melakukan tindakan demokratis yang terkoordinasi, serta membangun realitas bersama.

2. Struktur Kapitalisme Digital dan Arsitektur Algoritmik

Analisis menunjukkan bahwa polusi digital tidak dapat dilepaskan dari struktur ekonomi perhatian dalam kapitalisme digital. Platform digital beroperasi berdasarkan logika

keterlibatan (*engagement*), sehingga konten yang memicu emosi kuat cenderung lebih diprioritaskan dibandingkan informasi yang akurat namun tidak sensasional (Zuboff, 2019). Algoritma, dalam hal ini, tidak bersifat netral, karena membentuk struktur visibilitas informasi dan menentukan apa yang dianggap relevan dalam ruang publik.

Dalam kasus Skandal *Cambridge Analytica* menjadi bukti empiris bagaimana arsitektur algoritmik digunakan untuk memanen data psikografis guna menyebarkan iklan politik yang memecah belah. Algoritma platform secara sistematis memperkuat narasi kemarahan karena menghasilkan keterlibatan pengguna yang lebih lama, yang secara langsung berujung pada pendapatan iklan bagi platform. Logika operasional ini menciptakan "ruang gema" (*echo chambers*) yang memperdalam polarisasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Lehoucq (2024), kedaulatan digital kini bergeser dari penguasaan teritorial menuju penguasaan aliran data dan narasi yang dikendalikan oleh segelintir korporasi teknologi global.

Di balik tampilan netralitas teknologi, algoritma yang mengatur aliran informasi digital menyematkan pilihan nilai tertentu, kepentingan komersial, dan konfigurasi kekuasaan yang tidak netral. Ketika perusahaan platform besar *Meta, Alphabet, ByteDance* menentukan melalui proses algoritmik eksklusif konten mana yang diperkuat dan mana yang ditekan, mereka berfungsi sebagai sistem editorial terbesar dalam sejarah komunikasi manusia tanpa akuntabilitas editorial yang sepadan (Gillespie, 2014, Foucault, 1980).

Fragmentasi realitas yang ditimbulkan oleh model bisnis kapitalisme digital bukanlah efek samping yang tak disengaja, melainkan ciri struktural dari logika ekonomi perhatian. Platform yang memaksimalkan waktu keterlibatan tidak memiliki insentif ekonomi untuk mendistribusikan konten yang akurat namun kurang menarik, atau untuk mengoreksi narasi yang salah namun sangat menarik. Dalam logika operasional ekonomi perhatian, polarisasi dan fragmentasi ontologis yang dihasilkan oleh polusi digital bukan masalah yang harus diselesaikan, melainkan mesin penggerak keterlibatan pengguna dan pendapatan iklan.

3. Keterbatasan Pendekatan Parsial terhadap Polusi Digital

Penelitian ini mengidentifikasi bahwa respons konvensional terhadap misinformasi cenderung berfokus pada dua pendekatan utama: literasi media individu dan regulasi konten oleh negara atau platform. Meskipun penting, kedua pendekatan ini bersifat parsial dan belum menyentuh integrasi sistemik antar aktor. Literasi media tidak akan efektif jika arsitektur algoritma tetap mendorong amplifikasi konten yang merusak secara epistemik. Sebaliknya, regulasi yang represif tanpa penguatan kompetensi publik berpotensi menimbulkan persoalan kebebasan berekspresi.

Kasus Kegagalan fitur *fact-checking* label pada platform X (dahulu Twitter) selama krisis kesehatan global menunjukkan keterbatasan pendekatan parsial. Meskipun informasi salah diberi label "menyesatkan", pengguna yang sudah terpolarisasi justru melihat label tersebut sebagai bentuk sensor atau konspirasi elite, yang justru memperkuat bias konfirmasi mereka. Kebutuhan akan "literasi algoritmik" menjadi mendesak agar warga negara mampu mengenali bagaimana sistem kurasi otomatis membentuk lanskap informasi mereka (Kumar, 2024).

Efektivitas program literasi media konvensional juga dibatasi oleh fokusnya pada isi pesan individual, tanpa mempertimbangkan arsitektur distribusi, insentif, dan kurasi yang menentukan pesan mana yang sampai ke audiens mana dan untuk kepentingan siapa. Kesiapsiagaan kewarganegaraan dalam konteks ruang publik yang dimediasi algoritma menuntut apa yang disebut sebagai literasi algoritmik. Kemampuan kritis untuk mengenali bagaimana sistem kurasi konten otomatis membentuk lanskap informasi yang dihuni warga, serta secara aktif mencari perspektif yang bertentangan sebagai praktik kewarganegaraan yang sadar.

4. Kerangka Tata Kelola Kebenaran (*Truth Governance Framework/TGF*)

Sebagai temuan konseptual utama, penelitian ini merumuskan Kerangka Tata Kelola Kebenaran (TGF) yang mencakup tiga dimensi yang saling bergantung. Wawasan struktural inti dari kerangka kerja ini adalah bahwa intervensi satu domain sekalipun dirancang dengan baik dalam domainnya akan gagal menghasilkan perbaikan yang berkelanjutan dalam kesehatan epistemik karena dinamika umpan balik dari keseluruhan sistem akan mereproduksi polusi digital melalui domain yang belum ditangani.

Tabel 1. Arsitektur Tiga Domain Kerangka Tata Kelola Kebenaran (TGF)

Domain	Komponen	Indikator Hasil Utama
Domain 1: Lapisan Kewarganegaraan (CEC)	Pendidikan epistemik, literasi algoritmik, norma partisipasi media berbasis nubuwah	Kapasitas evaluasi informasi kritis, prevalensi keyakinan palsu, toleransi kompleksitas epistemik
Domain 2: Lapisan Institusional (IEI)	Standar integritas jurnalistik berbasis etika profetik, praktik komunikasi ilmiah transparan, akuntabilitas kelembagaan	Kepercayaan publik terhadap institusi, tingkat akurasi jurnalistik, aksesibilitas komunikasi ilmiah
Domain 3: Lapisan Struktural (PEA)	Transparansi algoritmik wajib, akuntabilitas platform, reformasi	Skor transparansi algoritmik, tingkat akuntabilitas amplifikasi

Domain	Komponen	Indikator Hasil Utama
	model bisnis digital, undang-undang hak digital	platform, indeks keragaman model bisnis

Sumber: Dikembangkan oleh penulis berdasarkan sintesis teoretis (2020)

Domain 1 (Kompetensi Epistemik Kewarganegaraan/CEC) berfokus pada penguatan kemampuan masyarakat dalam berpikir kritis, melakukan verifikasi, dan memahami bias informasi. Kompetensi ini harus ditumbuhkan secara kolektif oleh sistem pendidikan, lembaga jurnalistik, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas keagamaan sebagai kebutuhan demokrasi yang mendesak. Domain 2 (*Integritas Epistemik Institusional/IEI*) mensyaratkan penguatan komitmen institusi media, pendidikan, dan negara terhadap standar kebenaran, transparansi, serta akuntabilitas dalam produksi dan distribusi informasi. Domain 3 (*Arsitektur Epistemik Platform/PEA*) menuntut rekonstruksi desain algoritma dan tata kelola platform agar lebih bertanggung jawab terhadap kualitas epistemik informasi, bukan semata-mata optimalisasi keuntungan ekonomi.

5. Komunikasi Trans-Nubuwwah sebagai Model Epistemik Profetik

Konsep nubuwah yang merujuk pada fungsi kenabian dalam menerima, membawa, dan menyampaikan kebenaran secara setia lintas komunitas dan generasi menjadi landasan normatif bagi persyaratan integritas epistemik kelembagaan pada Domain 2 TGF. Sebagaimana dikembangkan secara sistematis dalam karya ilmiah (M. Yoserizal Saragih, 2018, 2025a, 2025b, 2025c), jurnalisme profetik mengintegrasikan empat sifat kenabian sebagai arsitektur etika operasionalnya *siddiq* (kejujuran dan integritas mutlak dalam pelaporan), *amanah* (kepercayaan dan pengelolaan informasi yang setia sebagai amanah publik), *tabligh* (komunikasi yang transparan dan bertanggung jawab demi kebaikan publik), dan *fathanah* (kecerdasan kritis dan kebijaksanaan untuk membedakan kebenaran dari kebohongan dalam kondisi ketidakpastian).

Kasus Praktik *slow journalism* yang menolak "kecepatan" demi "ketepatan" adalah manifestasi praktis dari nilai *fathanah* dan *siddiq*. Di tengah banjir informasi instan, model media yang berani mengorbankan klik demi verifikasi berlapis menunjukkan bagaimana etika profetik menjadi jangkar integritas institusional. Komunikasi trans-nubuwwah, sebagaimana diuraikan dalam artikel ini, merujuk pada model praktik jurnalistik dan komunikasi publik yang mengintegrasikan sifat-sifat kenabian sebagai landasan normatifnya, serta secara eksplisit berorientasi pada tanggung jawab peradaban.

Komunikator *nubuwwah* dicirikan oleh empat orientasi yang menentukan:

1. komitmen terhadap kebenaran sebagai kewajiban peradaban.
2. Keberanian epistemik untuk mengkomunikasikan kebenaran yang sulit di hadapan tekanan sosial dan insentif algoritmik.
3. Tanggung jawab terhadap generasi mendatang.
4. Integrasi kerendahan hati epistemik dengan kejernihan moral.

Konsep ini tidak memasukkan otoritas keagamaan ke dalam tata kelola epistemik sekuler, melainkan mengacu pada arsitektur normatif komunikasi kenabian sebagai kerangka kerja yang dapat diterapkan secara global untuk etika jurnalistik di era digital. Ini merupakan kontribusi teoretis khas Global Selatan bagi studi komunikasi internasional memperkenalkan nilai-nilai peradaban non-Barat ke dalam arsitektur tata kelola epistemik tanpa mengabaikan wawasan dari tradisi teoretis Barat.

6. Proposisi Teoretis dan Hipotesis yang Dapat Diuji

Berdasarkan analisis di atas, artikel ini mengemukakan tiga proposisi teoretis orisinal. Pertama, polusi digital merupakan krisis ontologis yang secara kualitatif berbeda dari sekadar misinformasi atau disinformasi polusi digital merupakan kondisi struktural yang menghancurkan prasyarat epistemik deliberasi demokratis. Kedua, komunikasi *trans-nubuwwah* merupakan model profetik-epistemik yang menawarkan landasan normatif bagi jurnalisme yang bertanggung jawab terhadap peradaban. Ketiga, TGF merupakan arsitektur yang dapat diuji, relevan dengan kebijakan, dan dapat diterapkan secara global untuk perbaikan epistemik.

Dari TGF dapat diturunkan hipotesis yang dapat diuji secara empiris. (H1) Masyarakat dengan skor CEC yang lebih tinggi akan menunjukkan kerentanan yang lebih rendah terhadap polusi digital. (H2) Reformasi algoritmik platform yang mengurangi tekanan optimalisasi keterlibatan hanya akan menghasilkan peningkatan kesehatan epistemik yang signifikan jika disertai investasi simultan dalam CEC dan IEI. (H3) Organisasi jurnalistik yang beroperasi sesuai prinsip komunikasi *trans-nubuwwah* akan menunjukkan skor kepercayaan publik dan peringkat akurasi yang lebih tinggi. (H4) Negara yang menerapkan reformasi tata kelola epistemik terintegrasi yang konsisten dengan TGF akan menunjukkan peningkatan berkelanjutan dalam indikator kesehatan epistemik.

7. Implikasi Teoretis dan Praktis

Secara teoretis, penelitian ini memperluas diskursus mengenai *post-truth* dan disinformasi dengan menempatkan polusi digital sebagai patologi struktural peradaban digital,

bukan sekadar kegagalan teknis atau deviasi perilaku individual. Penelitian ini juga memperkenalkan konsep komunikasi trans-nubuwwah sebagai kontribusi epistemik dari tradisi intelektual Islam ke dalam wacana komunikasi global.

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan arah kebijakan yang menekankan pentingnya reformasi desain platform yang memisahkan pendapatan dari upaya memaksimalkan perhatian, penguatan institusi jurnalistik melalui standar etika profetik, pendidikan literasi kritis yang melampaui literasi media konvensional menuju kompetensi epistemik mendalam dan koordinasi regulasi lintas yurisdiksi untuk menangani sifat global polusi digital. Penyelesaian polusi digital memerlukan rekonstruksi tata kelola kebenaran yang bersifat sistemik, lintas sektor, dan berbasis nilai.

Conclusion

Artikel ini menegaskan bahwa polusi digital merupakan krisis struktural dalam peradaban digital global yang melampaui persoalan misinformasi dan disinformasi semata. Polusi digital adalah degradasi sistemik terhadap lingkungan epistemik publik yang terjadi akibat interaksi antara kapitalisme digital, arsitektur algoritmik platform, fragmentasi ruang publik, dan melemahnya kompetensi epistemik masyarakat. Fenomena *post-truth* menunjukkan bahwa kebenaran tidak lagi menjadi pusat gravitasi dalam pembentukan opini publik, sementara algoritma platform memperkuat dinamika tersebut melalui logika ekonomi perhatian.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan parsial baik melalui literasi media semata maupun regulasi konten yang terbatas tidak cukup untuk mengatasi polusi digital. Diperlukan kerangka tata kelola yang terintegrasi dan sistemik. Oleh karena itu, artikel ini merumuskan *Truth Governance Framework (TGF)* yang mencakup tiga dimensi utama: *Civic Epistemic Competence (CEC)*, *Institutional Epistemic Integrity (IEI)*, dan *Platform Epistemic Architecture (PEA)*. Ketiga dimensi tersebut harus berjalan secara simultan dan saling memperkuat dalam membangun ketahanan epistemik masyarakat digital.

Artikel ini juga menegaskan pentingnya kontribusi Global Selatan melalui nilai-nilai jurnalistik profetik seperti *siddiq*, *amanah*, *tabligh*, *fathanah*, dan prinsip *tabayun* sebagai fondasi normatif dalam memperkuat tata kelola kebenaran. Model komunikasi trans-nubuwwah yang dikembangkan berdasarkan karya ilmiah M. Yoserizal Saragih menawarkan perspektif peradaban non-Barat yang memperkaya bukan menggantikan diskursus tata kelola epistemik global.

Implications and Recommendations

Secara praktis, temuan ini berimplikasi pada perlunya pergeseran kebijakan dari

sekadar "penghapusan konten" menuju "reformasi arsitektur". Pemerintah dan pengembang platform harus didorong untuk mengadopsi transparansi algoritmik yang memungkinkan audit publik terhadap aliran informasi. Bagi lembaga pendidikan, kurikulum literasi harus bertransformasi menjadi pendidikan epistemik yang mendalam, yang membekali warga negara dengan kemampuan mendeteksi bias sistemik, bukan sekadar membedakan fakta dan hoaks.

Recommendations for Future Research

1. Diperlukan studi empiris lebih lanjut untuk menguji efektivitas operasionalisasi indikator TGF dalam berbagai konteks sosiokultural yang berbeda, terutama di wilayah dengan tingkat literasi digital yang heterogen.
2. Penelitian masa depan perlu mengeksplorasi integrasi kecerdasan buatan (*AI Governance*) ke dalam lapisan *Platform Epistemic Architecture* (PEA) untuk melihat sejauh mana otomatisasi dapat mendukung, atau justru memperburuk, integritas informasi.
3. Kajian lebih mendalam mengenai adaptasi model komunikasi trans-nubuwwah dalam platform media sosial berbasis algoritma video pendek (seperti TikTok atau Reels) sangat diperlukan untuk melihat relevansi etika profetik dalam format komunikasi kontemporer.

Polusi digital harus dipahami sebagai tantangan peradaban yang memerlukan rekonstruksi tata kelola kebenaran secara menyeluruh. Para arsitek peradaban generasi berikutnya jurnalis, akademisi, pendidik, pembuat kebijakan, perancang platform, dan warga negara yang peduli memikul tanggung jawab yang bersifat profesional, politis, epistemologis, dan moral secara bersamaan untuk membangun lingkungan epistemik yang lebih sehat bagi demokrasi digital.

References

Books

- Baudrillard, J. (1994). *Simulacra and simulation*. Ann Arbor: University of Michigan Press.
- Dahl, R. A. (1989). *Democracy and its critics*. New Haven: Yale University Press.
- Feyerabend, P. (1975). *Against method: Outline of an anarchistic theory of knowledge*. London: New Left Books.
- Foucault, M. (1980). *Power/knowledge: Selected interviews and other writings 1972–1977*. New York: Pantheon Books.
- Habermas, J. (1989). *The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society*. Cambridge: MIT Press.
- Kahneman, D. (2011). *Thinking, fast and slow*. New York: Farrar, Straus and Giroux.
- Kuhn, T. S. (1962). *The structure of scientific revolutions*. Chicago: University of Chicago Press.
- McIntyre, L. (2018). *Post-truth*. Cambridge: MIT Press.
- Pariser, E. (2011). *The filter bubble: What the internet is hiding from you*. New York: Penguin Press.
- Popper, K. R. (1959). *The logic of scientific discovery*. London: Hutchinson.
- Saragih, M. Y. (2025a). *Paradigma jurnalistik ekoteologi Islam Nusantara: Perspektif tauhid, kurikulum cinta, kearifan lokal, dan etika Pancasila untuk ekoteologi Islam global*. Jakarta: Angkasa Media Literasi.
- Saragih, M. Y. (2025b). *Jurnalistik profetik: Integrasi nilai akhlak nabuwwah, teknologi AI, kurikulum berbasis cinta serta hukum dan etika penyiaran jurnalistik*. Jakarta: CV. Global Kreatif Media.
- Saragih, M. Y. (2025c). *Jurnalistik Islam*. Jakarta: Guepedia.
- Sunstein, C. R. (2017). *#Republic: Divided democracy in the age of social media*. Princeton: Princeton University Press.
- Zuboff, S. (2019). *The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power*. New York: PublicAffairs.

Book Chapter

- Gillespie, T. (2014). The relevance of algorithms. In T. Gillespie, P. J. Boczkowski & K. A. Foot (Eds.), *Media technologies: Essays on communication, materiality, and society*

(pp. 167-194). Cambridge: MIT Press.

Journal Article with DOI

Hameleers, M. (2023). The epistemic crisis of post-truth communication: How disinformation and alternative facts undermine democratic deliberation. *Journal of Digital Journalism*, 11(4), 567–585. <https://doi.org/10.1080/21670811.2023.2191332>

Kumar, R. (2024). Algorithmic literacy as a prerequisite for digital citizenship: A systematic review. *International Journal of Communication and Information Studies*, 14(2), 201–220.

Lehuedé, A. (2024). Digital sovereignty and the Global South: Resisting algorithmic colonialism through data governance. *New Media & Society*, 26(1), 45–63. <https://doi.org/10.1177/14614448231200456>

Lewandowsky, S., Ecker, U. K. H., & Cook, J. (2017). Beyond misinformation: Understanding and coping with the post-truth era. *Journal of Applied Research in Memory and Cognition*, 6(4), 353–369. <https://doi.org/10.1016/j.jarmac.2017.07.008>

Pennycook, G., Cannon, T. D., & Rand, D. G. (2018). Prior exposure increases perceived accuracy of fake news. *Journal of Experimental Psychology: General*, 147(12), 1865–1880. <https://doi.org/10.1037/xge0000465>

Saragih, M. Y. (2018). Some characteristics of Islamic journalism based on Al Quran. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 1(1), 1–10.

Saragih, M. Y., & Harahap, A. I. (2020). The challenges of print media journalism in the digital era. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 3(1), 540–548. <https://doi.org/10.33258/birci.v3i1.805>

Suhendri, S., Lubis, H. H., Dasa Syawal Syahputra, & Taufik Hidayat. (2022). Utilization of Facebook Live Streaming in Online Missionary Endeavor at the Ar-Risalah Al-Khairiyah Foundation. *WARAQAT : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 7(1), 86-98. <https://doi.org/10.51590/waraqat.v7i1.253>

Journal / Report on Website

Bradshaw, S., & Howard, P. N. (2019). The global disinformation order: 2019 global inventory of organised social media manipulation. Oxford Internet Institute. Retrieved from <https://demtech.oii.ox.ac.uk/research/posts/the-global-disinformation-order-2019-global-inventory-of-organised-social-media-manipulation/>

Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policymaking. Council of Europe Report DGI(2017)09. Retrieved from <https://rm.coe.int/information-disorder-toward-an-interdisciplinary-framework-for-researc/168076277c>

World Health Organization. (2020). Managing the COVID-19 infodemic: Promoting healthy behaviours and mitigating the harm from misinformation and disinformation. WHO. Retrieved from <https://www.who.int/publications/i/item/9789240010802>